

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : V  
Rapat Ke- : 12  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin, 24 Juni 2019  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara : Membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI Tahun Anggaran 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019, Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2020, dan isu-isu aktual bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Ketua Rapat : Viva Yoga Mauladi, M.Si.  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 38 Anggota dari 47 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM (Sekretaris Jenderal);
3. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)
4. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
5. Ir. Wiratno, M.Sc (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);
6. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Drs. M.R. Karliansyah, M.S (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
8. Rosa Vivien Ratnawati, SH., M.Sc (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya);
9. Ir. Hudoyo, MM. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung);
10. Ir. Helmi Basalamah, MM (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
11. Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP (Plt. Inspektur Jenderal)
12. Ir. Hartono Prawiraatmadja, M.Sc. (Sekreraris Badan Restorasi Gambut)); dan
13. Denaldy M. Mauna (Direktur Utama Perum Perhutani) beserta jajarannya

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun Anggaran 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019, Pembahasan RKA-K/L, dan RKP-K/L Tahun 2020, dan isu-isu aktual bidang lingkungan hidup dan kehutanan, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Viva Yoga Mauladi, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 dari BPK RI. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperbesar serapan anggaran Tahun 2019 dengan meningkatkan kualitas kinerja, sehingga predikat WTP dapat dipertahankan.
2. Komisi IV DPR RI menerima laporan atas tindak lanjut Hapsem BPK Semester II Tahun 2018 dan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan keseluruhan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI .
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp2.530.372.998.000,00 atau 27,88% dari Pagu APBN Tahun 2019 sebesar Rp9.076.472.682.000,00, dan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memprioritaskan penyelesaian program-program kerakyatan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan.
4. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran pada APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 sebesar Rp247.600.000.000,00 (pengurangan anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung), sehingga Pagu APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 per-Eselon I adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp647.505.787.000,00;
  - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp86.837.312.000,00;
  - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar Rp272.005.339.000,00;
  - d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp3.265.313.670.000,00;
  - e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1.620.053.025.000,00;
  - f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp493.725.576.000,00;
  - g. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp452.056.380.000,00;
  - h. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp450.634.941.000,00;
  - i. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp346.068.857.000,00;
  - j. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp285.782.534.000,00;

- k. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp544.294.191.000,00;
  - l. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp293.854.125.000,00; dan
  - m. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp318.340.945.000,00.
5. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif RAPBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2020 sebesar Rp9.219.231.497.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp592.759.666.000,00;
  - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp86.966.609.000,00;
  - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar Rp300.399.790.000,00;
  - d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp2.799.916.214.000,00;
  - e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1.950.159.356.000,00;
  - f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp480.755.829.000,00;
  - g. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp458.679.200.000,00;
  - h. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp468.790.771.000,00;
  - i. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp313.272.831.000,00;
  - j. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp361.844.139.000,00;
  - k. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp370.467.758.000,00;
  - l. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi sebesar Rp393.833.245.000,00;
  - m. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp341.386.089.000,00;
  - n. Badan Restorasi Gambut sebesar Rp300.000.000.000,00.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pendalaman untuk membahas berdasarkan program dan kegiatan secara lebih detail sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran pada pagu RAPBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebesar Rp2.509.000.000.000,00 yang akan dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, program pengelolaan sampah, biaya pemeliharaan aset gedung kantor Manggala Wanabakti, dana dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan, kegiatan penguatan pendukung pendidikan vokasi, pengadaan sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan, dan penyelesaian target pemulihan lahan gambut melalui kegiatan restorasi gambut di 7 (tujuh) provinsi.

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperbaiki dan menjaga kelestarian hutan terutama dari kegiatan perusakan hutan (*illegal logging*) dan perambahan kawasan hutan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengotimalkan pengembangan/budidaya serta peningkatan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti minyak kayu putih, madu, jernang (buah rotan), kratom, getah, gaharu, kemenyan, dan produk HHBK lainnya.
9. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian penyempurnaan kelembagaan Badan Layanan Umum/lembaga dana bergulir.

## II. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB.

Menteri  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Viva Yoga Mauladi, M.Si**  
A-493

